

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tokoh aliran ekonomi Adam Smith menganggap bahwa manusia adalah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya ialah karena alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan.² Manusia diartikan sebagai peran modal utama dalam membangun suatu wilayah juga negara menjadi lebih baik. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator yang digunakan sebagai pengukur kemajuan suatu negara, selain itu untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan baik di tingkat daerah maupun pusat maka harus bertumpu pada manusia sebagai akselerator pembangunan³

Indeks pembangunan manusia (IPM) masuk sebagai amanah Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dengan adanya IPM, negara dapat mengetahui seberapa berhasilkah negara tersebut dapat mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. IPM sendiri dikenalkan oleh *United National Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan

² S. Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Prespektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 4.

³ M.L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT Raja Wali Pers Persada, 2014), hal. 414.

dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

Prinsipnya atau tujuan dasar dari pembangunan ini yaitu untuk memberikan banyak pilihan kepada masyarakat yang dimana pilihan-pilihan ini tidak terbatas sehingga masyarakat bisa memperoleh akses yang lebih besar dibidang pengetahuan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, mata pencaharian yang aman dan lain sebagainya. Secara garis besar pembangunan manusia memiliki dasar atau sasaran yang tegas yang ingin dicapai, yaitu hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan dan dapat menikmati hidup yang layak.

IPM adalah tolak ukur angka kemakmuran atau kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dapat dilihat berdasarkan tiga dimensi dasar yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir, angka melek huruf / rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli.⁴ Kualitas SDM yang rendah menyebabkan rendahnya ketersediaan dan kualitas sektor-sektor kehidupan masyarakat yang mengakibatkan rendahnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.⁵ Kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari daya beli masyarakat yang semakin naik dan kebutuhan masyarakat yang mampu terpenuhi.⁶

⁴ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 57.

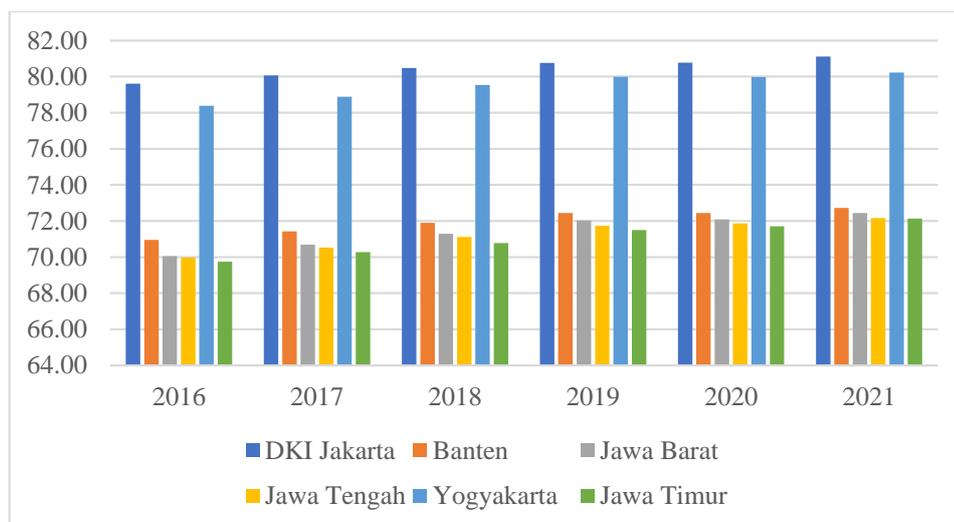
⁵ Dr. Imamudin Yuliadi, SE, M.Si, *Perekonomian Indonesia – Masalah dan Implementasi Kebijakan*, (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2007), hal. 167.

⁶ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 31.

Negara Indonesia ialah suatu negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Negara Indonesia terdapat 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dimana luas negara Indonesia saat ini 1.904.569 km² dan merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau dari yang besar sampai pulau terkecil, dengan populasi penduduk yaitu sebesar 269 juta jiwa dan pulau Jawa merupakan lokasi paling banyak penduduknya diseluruh Indonesia.

Di pulau Jawa terdapat 6 provinsi yaitu provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Keadaan pembangunan manusianya tiap provinsi memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Dibawah ini merupakan IPM pada setiap provinsi di Jawa tahun 2016-2021.

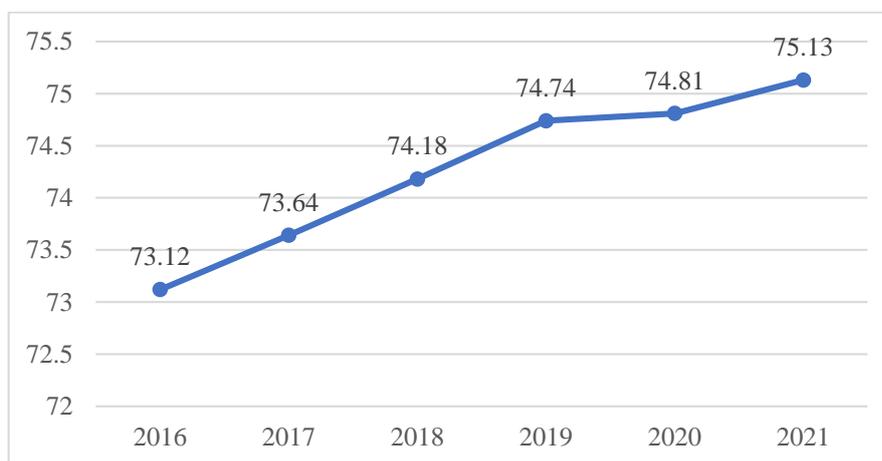
Tabel 1.1
Persentase Indeks Pembangunan Manusia Setiap Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2021



Sumber: BPS, data diolah 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun IPM pada tiap provinsi mengalami peningkatan. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang berada pada kategori sangat tinggi, sedangkan ke lima provinsi lainnya dalam kategori tinggi. Berikut ini adalah diagram rata-rata IPM semua provinsi di Pulau Jawa tiap tahunnya.

Grafik 1.1
Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Semua Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2021



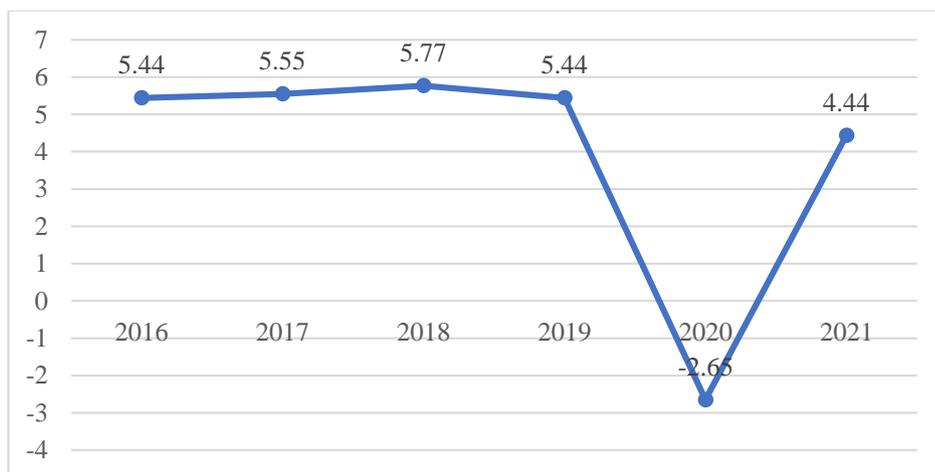
Sumber: BPS, data diolah 2022

Berdasarkan grafik diatas maka rata-rata IPM semua provinsi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa tiap tahunnya dari tahun 2016 sampai 2021 terus mengalami kenaikan, yang berarti IPM di provinsi Pulau Jawa terus membaik dan kesejahteraan juga kemakmuran rakyatnya baik pula. Beberapa faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusianya.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dimanfaatkan sebagai pengukuran prestasi ekonomi suatu negara. Menurut Sukirno

“Pertumbuhan ekonomi adalah suatu gambaran dari perkembangan perekonomian dengan membandingkan periode tertentu dengan periode sebelumnya dan perkembangan tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya”.⁷ Adanya indikator ini sebuah wilayah atau negara bisa mengetahui berbagai manfaat pembangunan tersebut guna menunjang kegiatan perekonomian, hal ini dapat mempermudah pemerintah dalam menentukan arah langkah dan kebijakan yang tepat yang harus ditempuh untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi perekonomian yang terjadi. Apabila kondisi perekonomian ini mengalami situasi yang baik maka tujuan pembangunan yang dijalankan telah berhasil dengan baik. Dibawah ini rata-rata pertumbuhan ekonomi untuk semua provinsi di Jawa.

Grafik 1.2
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Semua Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2021



Sumber: BPS, data diolah 2022

⁷ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi, Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2013), hal. 198.

Pertumbuhan ekonomi semua provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2021 tergolong fluktuatif naik turun. Dari tahun 2016 sampai 2018 terus mengalami kenaikan, namun untuk di tahun 2019 dan 2020 cenderung turun, hal ini diakibatkan karena efek dari pandemi Covid-19 yang melanda negara Indonesia namun di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi semua provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan kembali hal ini terjadi karena adanya penurunan drastis angka positif Covid-19 sehingga perekonomian daerah-daerah mulai stabil.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber penerimaan daerah tersebut. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸ PAD adalah suatu indikator yang dapat memperlihatkan kesejahteraan masyarakatnya dikarenakan PAD tentunya akan sangat bertopang pada pendapatan daerahnya itu sendiri. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah tersebut, maka daerah tersebut akan mampu memenuhi dan membiayai keperluan yang diharapkan oleh masyarakat.⁹ Selain itu apabila pendapatan daerah itu tinggi pemerintah daerah tidak perlu bergantung pada dana transferan atau dana bantuan dari pemerintah pusat yang berupa dana alokasi umum.

⁸ Gede Ferdi W dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA”, *E-Jurnal Aluntansi Universitas Udaya*, Vol. 16 No. 3 Tahun 2016.

⁹ Andriana Okta, Moeh. Fathottazi dan Rafael Purtomo, “Pengaruh Kemiskinan, PDRB dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur”, *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium*, Vol. 2 No. 1, 2018, hal. 12

Grafik 1.3
Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Semua Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2021



Sumber: BPS, data diolah 2022

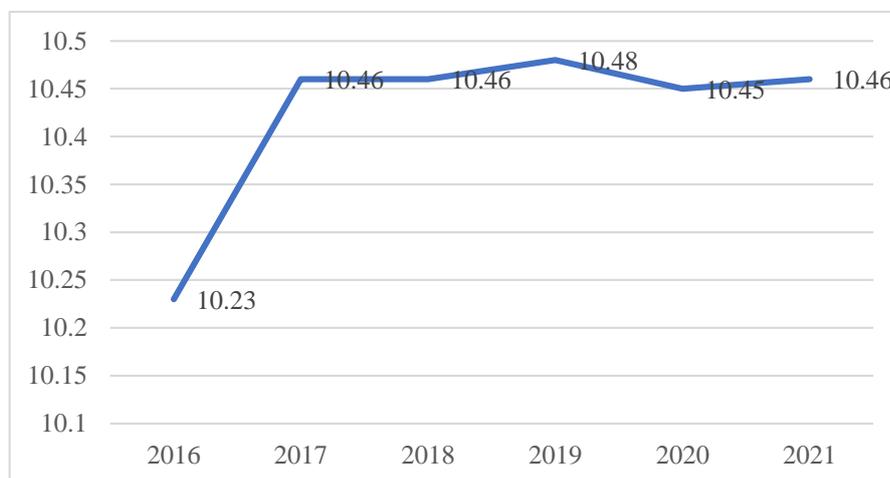
Dari hasil rata-rata pendapatan asli daerah dapat dilihat dari grafik diatas memperlihatkan bahawa setiap tahunnya mulai dari tahun 2016-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Pendapatan yang tinggi menunjukkan bahawa sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak, retribusi dan hasil yang sah lainnya berhasil ditingkatkan oleh pemerintah daerah tersebut.

Dana Alokasi Umum merupakan anggaran yang berasal dari pendapatan dan belanja negara (APBN) yang akan dipakai untuk penyeimbangan keuangan daerah untuk dana kebutuhan daerah dalam hal pelaksanaan desentralisasi kebijakan pemerintah. Pemerintah daerah tidak hanya mendapatkan penerimaan yang bersumber dari penerimaan dari pengelolaan daerahnya sendiri namun juga mendapat dorongan penerimaan dari negara. DAU memiliki sifat *Block Grant* yang berarti semua alokasi dana yang diterima dari pemerintah pusat diserahkan kepada daerah

sepenuhnya atau berhak menentukan sendiri penggunaan alokasi tersebut, dengan kata lain pemerintah daerah diberikan wewenang penuh yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengelola juga mengatur daerahnya sendiri.¹⁰ Dan apabila pemerintah daerah memiliki pendapatan yang cukup tinggi dan sudah mampu mengelola dan mengatur dananya sendiri tanpa adanya kekurangan dana, maka pemerintah daerah tidak memerlukan dana transferan dari pusat karena sudah dapat memenuhi pembelanjaan daerahnya sendiri. Dilihat dari diagram dibawah, rata-rata DAU semua provinsi di Pulau jawa dari tahun 2016-2021 terus mengalami kestabilan.

Grafik 1.4

Rata-rata Dana Alokasi Umum Semua Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2021

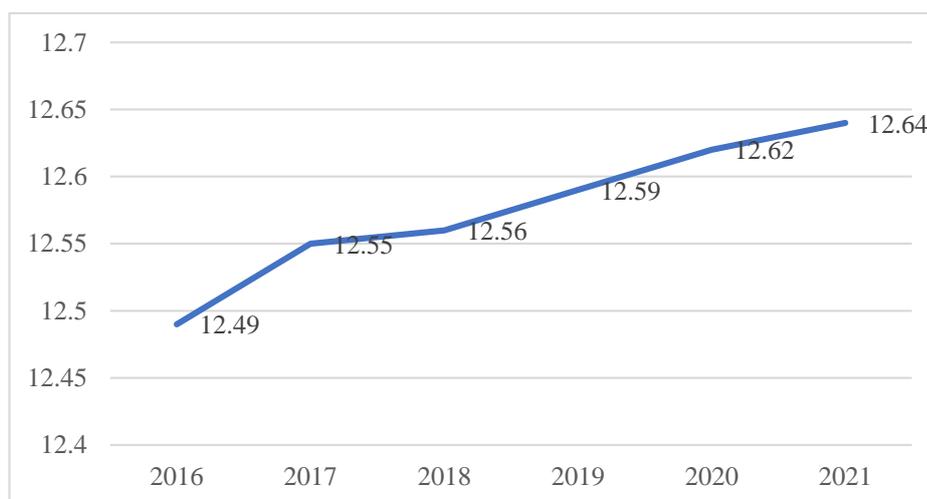


Sumber: BPS, data diolah 2022

¹⁰ Usnida Umar, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Sinjai", *Jurnal Ilmiah Administrasita*, Vol. 7 No. 01 Juni 2016.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam hal membiayai kegiatan yang bersifat khusus yang merupakan urusan dan kepentingan daerah sesuai dengan prioritas nasional yang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah. DAK digunakan sebagai biaya pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang belum mencapai standart tertentu juga sebagai pendorong percepatan pembangunan daerah.¹¹

Grafik 1.5
Rata-rata Dana Alokasi Khusus Semua Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2021



Sumber: BPS, data diolah 2022

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa rata-rata DAK semua provinsi di Pulau Jawa mengalami pergerakan naik. DAK yang pengalokasiannya dipakai untuk memberikan pelayanan publik maka

¹¹ Irianto, Baiq Kisnawati dkk, "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)", *Jurnal Ganec Swara*, Vol 15 No. 2, September 2021.

berarti memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan IPM pada daerah tersebut, melalui pengalokasian DAK yang telah diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur maka sumberdaya masyarakat diwilayah tersebut dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia. Pada penelitian ini apakah semakin tinggi nilai variabel bebasnya akan berdampak positif terhadap indeks pembangunan manusia di semua provinsi Pulau Jawa tahun 2016-2021. Indeks pembangunan manusia dapat diproyeksikan menggunakan variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2021)”** dengan menggunakan 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa tahun 2016-2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka selanjutnya perlu diadakan indentifikasi masalah penelitian sehingga

penelitian yang dilakukan memiliki ruang lingkup yang cukup jelas. Berikut indentifikasi dalam penelitian yaitu:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2021 ?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2021 ?
3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2021 ?
4. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2021 ?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2021 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2021

3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2021
4. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2021
5. Untuk mengetahui pengaruh bersama-sama antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2021

D. Manfaat Penelitian

Dapat diharapkan dalam penelitian ini bisa bermanfaat serta memiliki nilai tersendiri dalam bidangnya:

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini bisa bermanfaat serta memiliki nilai tersendiri dalam bidang ilmu pengetahuannya serta dapat dijadikan acuan sebagai bahan referensi ataupun rujukan bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini semoga menjadi pertimbangan pemerintah dalam ngekaji indeks pembangunan manusia untuk pemerindah daerah masing-masing, sehingga pemerintah dapat membuat rancangan pembangunan selanjutnya.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur penulisan terkait indeks pembangunan manusia serta sebagai bentuk sumbangan dan informasi yang berguna untuk menambah wawasan khususnya dalam ilmu Manajemen Keuangan Syariah dan juga digunakan sebagai sumber referensi bacaan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan nantinya bisa dipakai sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya, sehingga penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel bebas agar penelitiannya lebih mudah.

E. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Lingkungan

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang digunakan oleh penelitian ini adalah keseluruhan provinsi yang ada di Pulau Jawa yang berjumlah 6 Provinsi.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian perlu adanya batasan guna mempermudah melaksanakan penelitian dan dapat menghasilkan penelitian yang akurat sebab tidak menyeluruh. Batasannya yaitu hanya fokus pada 6 provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2021.

F. Penegasan Istilah

Bagian ini menjelaskan definisi konseptual dan definisi operasional, dimana definisi konseptual,

1. Definisi Konseptual

Menurut Riva Ubar Harahap indeks pembangunan manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, buta huruf, pendidikan dan standart hidup untuk semua negara seluruh dunia hal ini dengan tujuan untuk mengklarifikasi apakah sebuah negara tersebut tergolong negara maju atau negara berkembang.¹²

Menurut Novita Dewi pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Dalam kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi diartikan juga perkembangan ekonomi fisik, seperti pertambahan produksi barang maupun jasa juga perkembangan dibidang infrastruktur.¹³

Menurut Halim pendapatan asli daerah diartikan sebagai penerimaan yang didapat atau bersumber dari dalam wilayah suatu daerah tertentu yang kemudian dipungut berdasarkan UU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga sebagai pengamatan untuk melihat sejauh mana daerah tersebut dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri.¹⁴

¹² Riva Ubar Harahap, "Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara", (KITABAH, Vol. 2 No. 1, 2018)

¹³ Novita Dewi, "Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau", (JOM Fekom, Vol. 4 No. 1, 2017), hal. 874

¹⁴ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Selemba Empat, 2004), hal. 94.

Dana alokasi umum menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam hal pelaksanaan desentralisasi.¹⁵

Dana alokasi khusus menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN.¹⁶

2. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dimaksud adalah “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi-provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2021”.

G. Sistematika Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang gambaran dari isi proposal dengan komperensif dan sistematis, yang meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁵ UU Nomor 33 Tahun 2004

¹⁶ UU Nomor 33 Tahun 2004

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah peneliti dalam mengambil sebuah penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan mengenai semua variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Di bab ini dijelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, juga berisi sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab yang berisikan gambaran umum Provinsi-provinsi di Pulau Jawa juga membahas pengujian hipotesis penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini mencakup pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan serta saran yang relevan, pada bagian akhir laporan terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran, data informasi penunjang penelitian, surat-surat dan daftar riwayat hidup peneliti.